

RESUME MATERI SEMINAR

PENINGKATAN KETAHANAN BANGSA UNTUK MENJAGA KEUTUHAN NKRI

Graha Sanusi, 23 November 2016

Agenda pertama Nawa Cita pemerintahan presiden Joko Widodo, “menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara” harus dimaknai dalam konteks pertahanan dan keamanan negara baik secara fisik, ekonomi, social dan hukum sehingga diperlukan daya upaya dari segenap elemen masyarakat, dan bukan hanya menjadi tanggung jawab TNI. Dalam menjalankan tugasnya menjaga kedaulatan bangsa, TNI yang lahir dari perjuangan rakyat Indonesia itu sendiri membutuhkan kerjasama dari berbagai lembaga dan masyarakat. Ketahanan nasional bukan hanya masalah militer saja. Ketahanan militer bergantung kepada ketahanan pribadi dan ketahanan keluarga yang mewujud dalam karakter bangsa yang kuat. Karakter bangsa yang kuat harus dibangun sejak dini, dibangun secara konsisten melalui pola asuh, pengalaman dan pendidikan yang diharapkan menjadi nilai intrinsic yang melandasi sikap dan perilaku seseorang.

Menjaga kedaulatan bangsa Indonesia bukan perkara yang mudah. Banyak tantangan baik dari eksternal dan internal bangsa Indonesia yang perlu dipertimbangkan, antara lain :

Pertama, Globalisasi membawa perubahan besar dalam kehidupan social di seluruh Negara di belahan dunia. Salah satunya adalah penipisan batas geografis pada tatanan social dan politik. Hal ini akan mengancam eksistensi identitas nasional dari suatu negara dan akan mengancam karakter suatu bangsa. Oleh karenanya, menyiapkan generasi muda menjadi warga dunia yang tetap berpijak pada identitas bangsa adalah hal yang sangat penting. Generasi muda yang lahir pada era yang diwarnai oleh karakteristik zamannya memerlukan pembinaan untuk memiliki kemampuan dalam melanjutkan kehidupan suatu bangsa. Pembinaan seharusnya dapat dilakukan oleh keluarga, sebagai unit sosial pertama yang ditemui, dikenal dan hidup sepanjang kehidupan anak.

Kesadaran sebagai warga negara harus muncul dan diajarkan sejak dari rumah begitu pula kesadaran mengenai hak dan kewajiban. Perlu mengembangkan nuansa ke-Indonesia-an dirumah, dan dibiasakan misalkan dengan pemutaran lagu daerah untuk membiasakan anak-anak dengan suasana ke-Indonesia-an. Lembaga pendidikan juga bertanggung jawab untuk membangun dan mendidik mengenai ke-Indonesia-an karena kebangsaan Indonesia unik, karena tidak berdasarkan darah, etnis, namun kebangsaan Indonesia dibangun berdasarkan ide. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar kalimat, namun harus dirayakan. Saat

merayakan Bhinneka Tunggal Ika kita tidak hanya merayakan kebinekaan, tapi kita juga harus merayakan kesatuan sebagai suatu rangkaian.

Globalisasi juga membawa dampak pada perubahan fungsi media di Indonesia. Definisi era reformasi menjadi era kebebasan tanpa batas dan masa peralihan membuat media kita menderita krisis identitas. Televisi dan internet dipenuhi dengan hiburan berlebihan, sensualitas, konflik dan kekerasan, klenik, gaya hidup boros yang membuat masyarakat kita menjadi masyarakat yang konsumtif dan hedonis. Di sisi lain, mengutamakan nilai internasional masyarakat kita juga lebih senang menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dibandingkan bahasa Indonesia. Ironisnya, bahasa campur aduk itu digunakan oleh tokoh nasional yang seharusnya memberikan teladan dalam berbahasa. Sebuah pertanyaan muncul, bagaimanakah kita memiliki identitas bangsa yang baik jika bahasa yang digunakan tidak mencerminkan bahasa Indonesia yang baik?

Kedua, Posisi geografis dan potensi sumber daya alam Indonesia yang melimpah semakin strategis diperebutkan dalam kancah internasional sehingga upaya pertahanan negara dipertahankan dengan membangun, memelihara, mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada berdasarkan prinsip-prinsip demokratis. Dalam upayanya menjalankan fungsi kewenangan penguasaan atas sumber daya alam, banyak upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak untuk melakukan intervensi kepada pemerintah Indonesia. Peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berpedoman pada arahan konstitusi UUD 1945, Tap MPR No. IX/MPR/2001 seharusnya menjadi perundang-undangan ideal jika dilakukan secara konsisten dan taat asas hukum namun pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dipengaruhi oleh politik hukum penguasaan negara atas sumber daya alam itu sendiri. Negara menjalankan fungsi kewenangan penguasaan atas sumber daya alam dengan membuat kebijakan, membuat pengaturan, melakukan pengurusan, melakukan pengelolaan dan melakukan pengawasan. Kelima fungsi di atas merupakan mandat dari rakyat secara kolektif kepada pemerintah agar sumber daya alam tersebut dapat memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Intervensi terhadap negara ini akan menimbulkan permasalahan dan memungkinkan munculnya konflik terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang pada akhirnya akan menghambat akses masyarakat atas sumber daya alam tersebut. Masalah penegakan hukum pada negara berkembang seperti Indonesia pada umumnya mengalami kecatatan yang dapat menjadi celah untuk menyalahi penegakan hukum menurut kepentingan tertentu. Hal ini terjadi cukup serius dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Salah satu intervensi terhadap Negara adalah korupsi. Dalam visi, misi dan program aksi pemerintah presiden Joko Widodo, ditegaskan adanya 9 agenda jalan perubahan (Nawa cita) yang ditawarkan untuk menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Salah satunya adalah "agenda menolak negara lemah dengan melakukan

reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, dengan cara antara lain membangun politik legislasi yang kuat melalui pemberantasan korupsi, penegakan HAM, perlindungan lingkungan hidup dan reformasi lembaga penegakan hukum. " Namun, dalam kenyataannya korupsi masih banyak dilakukan, salah satunya di lembaga tinggi Negara.

Ketiga, ancaman *proxywar* di Indonesia yang disampaikan oleh Panglima TNI Jendral TNI Gatot Nurmantyo dalam berbagai kesempatan sebagai dampak keberadaan Indonesia di kawasan equator menambah peliknya masalah dalam penegakan kedaulatan negara. *Proxywar*, yaitu konfrontasi antara dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan untuk menghindari resiko konflik langsung yang beresiko pada kehancuran fatal. *Proxy war* dapat terlihat melalui munculnya gerakan separatis, demonstrasi massa yang tidak memiliki permasalahan jelas, penerapan regulasi yang merugikan, peredaran narkoba, bentrok antar kelompok, makanan dan obat-obatan palsu, *illegal logging* dan *illegal fishing*, seks bebas dan LGBT. Strategi untuk mengendalikan *proxy war* dapat dilakukan dengan berbagai strategi yaitu *government based-strategy*, *people based strategy* dan *collaboration based strategy*.

Ketiga hal diatas kemudian diperburuk dengan fakta bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, kepekaan terhadap kehidupan orang lain dan interaksi antar masyarakat semakin berkurang sehingga kesenjangan dalam hal ekonomi menjadi semakin kuat dan menimbulkan perasaan ketidakadilan dalam masyarakat, terutama pada masyarakat kecil yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan baik kekuasaan politik, hukum, ekonomi dan budaya. Hal ini dibuktikan dengan memburuknya persepsi masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Tidak menutup kemungkinan hal ini akan memudarkan identitas nasional dan menguatnya identitas kelompok, agama, kedaerahan, kesukuan dan lain sebagainya dan pada akhirnya akan menurunkan kesatuan bangsa. Jika kesatuan sebagai sebuah bangsa hilang maka akan menimbulkan bahaya yang amat besar.

Dalam seminar nasional peningkatan ketahanan bangsa untuk menjaga keutuhan NKRI pada hari ini, dapat disusun langkah-langkah solusi untuk penguatan kedaulatan rakyat, yaitu :

1. Membentuk tingkah laku territorial primer, yaitu teritori yang dipersonalisasi sebagai milik sendiri. Ketika sebuah masyarakat memiliki tingkah laku territorial primer maka akan muncul dalam dirinya sebuah pengalaman emosional baik kepada lingkungannya dan antar pribadi. Pengalaman emosional inilah yang memperkuat kelekatan dirinya dengan lingkungannya.
2. Membentuk *honorable commitment* yang tinggi, yaitu komitmen yang tinggi pada bangsa dan Negara Indonesia selayaknya pejuang kemerdekaan yang mempertaruhkan

jiwa, raga dan harta untuk kemerdekaan Indonesia. *Honorable commitment* dan nasionalisme akan menentukan terbentuknya identitas bangsa yang jelas yang tercermin melalui nilai budayanya, tradisi yang dipertahankan sebagai ciri bangsa, bahasa nasional dan politiknya.

3. Membentuk perasaan bangga pada produk-produk yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia, pada perilaku elemen bangsa dan pada keunggulan identitas bangsa.
4. Membentuk ketahanan keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan fisik, psikis, mental, spiritual guna hidup mandiri dan dapat mengembangkan diri serta keluarga melalui pemberdayaan seluruh anggota keluarga dan memfungsikan secara optimal fungsi keluarga dalam mencapai kesejahteraan keluarga.
5. Optimasi perkembangan generasi muda Indonesia melalui pengembangan kemampuan mengatur diri, kemampuan menjalin relasi sosial, kemandirian moral dan penghayatan wawasan kebangsaan.
6. Meningkatkan peran media khususnya televisi dan internet dalam mengembangkan pemahaman toleransi antar kelompok dan literasi terhadap penggunaan media. Sekaligus mengkampanyekan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan pembentuk identitas bangsa.
7. Pemberdayaan masyarakat melalui para tokoh masyarakat sebagai bagian dari keterpaduan langkah antar komponen negara seperti pemerintah, masyarakat, dan TNI/Polri, sebagai upaya melindungi kedaulatan bangsa Indonesia melalui *collaboration and people based strategy*.
8. Melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan melalui 3 pilar, yaitu ekonomi, social dan lingkungan yang saling bersinergi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam.

Sebagai kesimpulan, terdapat berbagai ancaman terkait dengan perubahan-perubahan didunia yang dapat mengancam kehidupan berbangsa sebagai NKRI sehingga perlu disikapi dan diwaspadai oleh Indonesia. Peluang yang telah tersedia seperti kebijakan, sikap manusia Indonesia yang optimis dan bonus demografi harus diupayakan agar dapat benar-benar menjadi keuntungan dalam menghadapi ancaman berbangsa. Manusia Indonesia yang masih tinggi "ego" nya sehingga keakuan ini dapat menjadi pemecah persatuan, oleh karena itu perlu untuk menumbuhkan ke-Indonesia-an agar dapat memelihara Bhinneka Tunggal Ika sebagai *Centre of Gravity* bangsa Indonesia.

"Indonesia milikku, Indonesia milikmu dan Indonesia milik kita bersama !"